

ABSTRAK

Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Kupang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai hasil akhir pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembentukan SiLPA berkaitan dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, kondisi surplus atau defisit, dan pembiayaan netto pada setiap akhir tahun anggaran. Perubahan pada komponen-komponen tersebut dapat menyebabkan nilai SiLPA mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perkembangan SiLPA perlu dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kupang selama Tahun Anggaran 2020–2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan APBD, perkembangan SiLPA, serta rasio SiLPA terhadap realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kupang selama Tahun Anggaran 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020–2024 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, analisis deskriptif komparatif, analisis tren, dan analisis rasio SiLPA terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kupang selama Tahun Anggaran 2020–2024 mengalami dinamika pada realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, kondisi surplus atau defisit, dan pembiayaan netto. Perubahan pada komponen-komponen tersebut berkaitan dengan perubahan nilai SiLPA pada setiap akhir tahun anggaran. Hasil analisis perkembangan dan tren menunjukkan bahwa SiLPA mengalami pola yang berfluktuasi. SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp111.326.776.656,35, kemudian menurun menjadi Rp78.425.744.451,66 pada tahun 2021 dan mencapai nilai terendah pada tahun 2022 sebesar Rp14.025.740.464,92. Selanjutnya, SiLPA meningkat menjadi Rp68.734.256.784,30 pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi Rp62.255.255.309,16 pada tahun 2024. Berdasarkan analisis perkembangan, perubahan SiLPA menunjukkan penurunan dan peningkatan yang berbeda setiap tahun, baik secara absolut maupun persentase. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan daerah tidak secara otomatis diikuti peningkatan SiLPA karena pembentukan SiLPA juga berkaitan dengan realisasi belanja, kondisi surplus atau defisit, dan pembiayaan netto.

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio SiLPA terhadap realisasi belanja daerah juga mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 9,68% pada tahun 2020, 6,61% pada tahun 2021, 1,14% pada tahun 2022, 5,56% pada tahun 2023, dan 4,46% pada tahun 2024. Rasio tersebut memberikan gambaran mengenai proporsi SiLPA terhadap realisasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran. Dalam penelitian ini, rasio SiLPA terhadap belanja daerah digunakan sebagai

alat analisis deskriptif dan tidak digunakan untuk menentukan baik atau buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah karena tidak terdapat standar baku yang secara khusus digunakan untuk mengategorikan rasio tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kupang selama Tahun Anggaran 2020–2024 menunjukkan dinamika yang tercermin pada perubahan realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan netto serta perkembangan SiLPA setiap tahun. SiLPA menunjukkan pola fluktuatif dengan perubahan absolut dan persentase yang berbeda pada setiap tahun, sedangkan rasio SiLPA terhadap realisasi belanja daerah menunjukkan perubahan proporsi dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam memahami pelaksanaan APBD dan perkembangan SiLPA serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: APBD, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Netto, Rasio SiLPA.